



Hanya Tampung 180 Ton/Hari

TPA Piyungan Mulai Dibuka Terbatas

Biar kabupaten kota itu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, karena sampah kan wewenang kabupaten kota, bukan provinsi.

Sri Sultan HB X
Gubernur DIY

YOGYA, TRIBUN - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Kabupaten Bantul tetap akan beroperasi secara terbatas setelah 5 September 2023. Seperti diketahui, Penda DIY memutuskan menutup TPA Piyungan selama 45 hari sejak 23 Juli hingga 5 September 2023.

TPA sampah yang menjadi tumpuan tiga wilayah yakni Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta tersebut terpaksa ditutup karena mengalami kelebihan kapasitas. Meski ditutup, khusus zona transisi satu tetap dibuka secara terbatas untuk menerima sampah dengan kuota sebanyak 180 ton sehari. "Kita tetap bisa dibuka, tetap bisa menampung, tapi terbatas," ungkap Sultan kepada awak media saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (4/9).

Dia mengungkapkan, sampah seharusnya juga menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Sedangkan Penda DIY sifatnya hanya memfasilitasi. Dengan demikian, yang

Hanya Tampung

● Sambungan Hal 1

dibuang ke TPA Piyungan hanyalah residu atau sisa sampah hasil pengolahan yang dilakukan kabupaten/kota. "Biar kabupaten kota itu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, karena sampah kan wewenang Kabupaten kota, bukan provinsi. Provinsi kan hanya memfasilitasi," kata Sultan.

Raja Keraton ini mengungkapkan, telah memberi izin kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan sejumlah bidang tanah tanah kas desa di DIY sebagai tempat pengolahan sampah. Hanya saja, Sultan belum menyebut lokasi pastinya. "Kita sudah mengizinkan, sekarang sudah berproses," ujar Sultan.

Selain itu juga ada upaya pengadaan alat pengelola sampah di akhir tahun 2023 ini oleh Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sehingga puluhan ton sampah dapat dimusnahkan dalam sehari. "Seperti Bantul, ya, kan untuk pengolahannya nanti Desember ada dua mesin yang bisa berproses kira kira per harinya 40-60 ton. Dua kan berarti 80 ton per hari," kata

Sultan. "Kota juga pesan dua alat masing masing 60 ton, berarti 120 ton," sambungnya.

Bisa ditutup

Sultan menyebut TPA Piyungan akan ditutup kembali jika kabupaten/kota tidak sanggup mengelola sampahnya masing-masing. Sebab jika itu terjadi, maka usia TPA Piyungan akan semakin singkat karena kondisinya yang telah kelebihan kapasitas. Karena itu, perlu dilakukan pembatasan terhadap jumlah sampah yang masuk, hingga Pemda DIY dapat melakukan pengadaan teknologi pengelolaan sampah baru pada 2024.

"Nanti semua diolah di kabupaten, bukan di Piyungan lagi. Memang tanggung jawab mereka (kabupaten/kota), *mengko nek soyo nganu* (nanti kalau semakin banyak sampah) *tak tutup meneh* (saya tutup lagi). Karena tanggung jawabnya ada di kabupaten kota, bukan provinsi," tegas Sultan.

Menurutnya, upaya pengelolaan sampah di daerah sudah tergolong baik. Beberapa daerah pun berinisiatif untuk mengadakan alat pengolahan sampah guna mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Namun, Sri Sultan menyayangkan mengapa langkah itu tidak dilakukan sejak dulu

atau sebelum TPA Piyungan memasuki masa kritis.

"*Nek ora dipekso ora mlaku* (kalau tidak dipaksa tidak jalan), itu saja. Kalau sekarang melakukan kan bisa, akhirnya mau investasi alat dan sebagainya. Kan gitu, yang tadinya *opo-opo* (apa-apa) dibuang Piyungan-Piyungan," tuturnya. "Di kabupaten, investasi (alat pengolahan sampah) sendiri-sendiri. Kan sudah dilakukan, kita sudah koordinasi," sambung Sultan.

Kuota

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, menyambut baik skema kuota terbatas di Piyungan. Alhasil, selepas 5 September, sampah dari Kota Yogyakarta tidak dibuang lagi menuju TPA Banyuroto, Kulon Progo. "Kita tidak kirim lagi ke Kulon Progo. Jadi, yang 15 ton itu kita alihkan ke beberapa lokasi, di TPST dan tentunya TPA Piyungan," ulasnya, Senin (4/9).

Pemkot kini tengah berupaya merevitalisasi TPST Nitikan 1, dengan harapan mampu mengolah sampah berkekuatan 15 ton per hari. Pengadaan alat pengolah limbah yang lebih memadai sudah dilakukannya di TPST tersebut, dengan gelontoran dana dari APBD Perubahan 2023.

"Sehingga bisa lebih banyak mengolah sampah secara tuntas. Untuk residu yang tidak bisa diolah lagi, jalan satu-satunya adalah dengan insinerator untuk memusnahkan itu," ucap Singgih.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto mengatakan, kuota pembuangan baru 127 ton per hari menuju TPA Piyungan setelah 5 September memang tak memberi dampak signifikan bagi wilayahnya. Namun demikian, ia bisa memahami kondisi itu, mengingat proses konstruksi di TPA Piyungan belum sepenuhnya selesai, setidaknya hingga bulan depan.

Terpisah, Kepala DLH Bantul, Ari Budi Nugroho mengatakan, se usai dibuka secara terbatas, Bantul mendapat kuota membuang sampah di TPA Piyungan sebesar 90 ton per hari. Sampah yang dialokasikan ke Piyungan merupakan residu. Di sisi lain, Sleman belum mengetahui berapa kuota yang didapatkan untuk membuang sampah di TPA Piyungan. Kondisi konkret baru bisa diketahui setelah 6 September, atau pasca TPA Piyungan bisa menerima sampah lagi setelah ditutup selama 45 hari. (tr/aka/mei/rif)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005